
Malika
Opini

Junos, 28 December 2012

Halaman 28

Perdagangan Bebas ASEAN Jilid II

Oleh: A.P. Edi Abmaja

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21 yang digelar di Pinom Park, Kamboja, pada 18-20 November 2011 lalu menimbulkan sejumlah peristiwa penting, mulai dari hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam konferensi tingkat tinggi tahunan itu, Indonesia setuju untuk menandatangani kesepakatan kerjasama menjadi Komunitas ASEAN 2015 dan Komitmen Ekonomi Regional Comprehensive (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCSEP).

Komititas Ekonomi ASEAN 2015 mengantikan pemberlakuan pasar bebas pada 2015 di antara sepuluh negara anggota ASEAN, yakni Kamboja, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Thailand, Filipina, dan Myanmar.

Sementara RCSEP mencakup kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN dengan enam negara mitra dialog, meliputi Jepang, India, China, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Kerangka RCSEP juga memuat pakta perdagangan bebas yang direncanakan berlaku mulai tahun 2016.

Indonesia resmi negara berdaulat menjadi perdagangan bebas ASEAN jilid kedua

itu. Saatnya, waktu yang sudah paling tidak tinggal tiga tahun lagi. Mampukah Indonesia bersaing dengan macan-macan Asia semacam Jepang, India, Korea Selatan, atau dengan negara ekonomi-tetangga terdekat kita seperti China?

Namun, jauh sebelum itu semestinya dipikirkan, dipertanyakan, kemudian dijawab: bisakah Indonesia memenangkan persaingan regional dengan sesama negara anggota ASEAN? **Panda! Berdaulat**

Selama ini, Indonesia seolah-olah menantikan diri bertukar kembali dalam arena persaingan global yang tak mengenal batas khatulistiwa. Berbagai perjanjian kerjasama ekonomi dibicarakan dengan dalih mempererat hubungan diplomatik di kawasan regional ataupun internasional.

Kenyataannya, justru negara lainlah yang memperoleh peluang untuk menjangkau keuntungan sebesar-besarnya di pasar luas dengan modal kerja murah seperti Indonesia. Rakyat Indonesia, sebagian besarnya, hanya menjadi penonton atau penonton yang dipukul habis-habisan.

Pengalihan perdagangan pakta perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) mengajarkan kepada kita untuk meninjau ulang perdagangan yang selama ini telah kita lakukan. Kenyataannya sudah saatnya dan peralihan kita waktu itu membuat produk China, membatasi di pasaran

buatan menjadi pasar-pasar tradisional tanpa pernah bisa dilangkahi apalagi didominasi produk domestik.

Akhirnya, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan sejumlah mitra perdagangannya dengan China. China pun sempat melayangkan protes karena tindakan aliansi pemerintah Indonesia untuk melakukan perdagangan terhadap produk dalam negeri dilandasi China bertentangan dengan prinsip-prinsip umum perdagangan internasional.

Dalam hukum perdagangan internasional, memang dikenal prinsip-prinsip umum yang termasuk dalam Perjanjian Umum dalam Tarif dan Perdagangan Barang (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) dan Perjanjian Umum dalam Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services/GATS)—keduanya merupakan kerangka hukum yang dijamin Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Prinsip-prinsip umum ini antara lain, pertama, negara importir dilarang memberi perlakuan khusus atau diskriminasi pembatasan terhadap produk-produk negara anggota WTO (non-discriminatory). Kedua, negara importir wajib memperlakukan produk impor sama dengan produk nasional (national treatment).

Kedua, perdagangan negara terhadap

produk nasionalnya adalah hanya dengan melalui tarif, selain itu dilarang (*protection through tariff*). Ketiga, perlakuan negara terhadap mitra dagang dari negara lain haruslah bersifat timbal-balik (*reciprocity*), khususnya dalam hal tarif dan masuk barang.

Kelima, perlakuan khusus dan hambatan bagi Negara Berkembang. Prinsip ini bersifat non-discriminatory, yang untuk mendapatkannya masih menunggu persyaratan tertentu (*generalized system of preferences/RCSEP*) (Prayogo, 2012: 9-22).

Indonesia resmi panda!-panda! menyalahi prinsip-prinsip umum perdagangan internasional yang saat ini sama liberal-lah di Indonesia sebagai anggota WTO resmi menjadi segala permasalahan yang telah dibicarakan dalam satu pertemuan (*round*) WTO. Tapi, di sisi lain, pemerintah masih melindungi kepentingan nasional, membuat produsen domestik, bagaimana pun caranya **Aktifitas yang Manjaulkan**

Dewasa ini, pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia, semakin strategis di kawasan global. Rasio pengirim barang Eropa dan Amerika mencapai banyak investor melalui Asia. Buluhnya, pertumbuhan ekonomi China dan Indonesia representasi Asia yang kian mengukir taklaka negara-negara Eropa dan Amerika mengalami kolaps.

Asia Tengah dan Timur Tengah belum stabil secara politik, sehingga amat rentan bagi investor untuk menanam modal di sana. Asia Timur pun sudah terjebak sangat-badai ekonomi. Cara-cara singkat wilayah dengan China, misalnya, pertumbuhan domestik Jepang menurun drastis. Kemandirian pertumbuhan Jepang semacam ini semakin nadir karena China.

Amat berbahaya bila sejumlah media melaporkan dugaan pembelian senjata antara China dan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kedua negara adidaya ini melalui Asia Tenggara sebagai alternatif yang menjanjikan, baik secara ekonomi maupun politik.

Dalam optik yang semacam inilah signifikannya perundingan Komitmen Ekonomi ASEAN 2015 dan RCSEP dilihat. Ia tak lebih dari agenda global untuk memantapkan Asia Tenggara, pun Indonesia, semakin rentan. Hal itu bisa jadi peluang, tapi juga dapat membuka pasar dalam negeri jika tak dibarengi dengan kemampuan.

Tampa strategi yang matang dan komitmen untuk melindungi produsen domestik, Indonesia hanya akan tinggal menjadi ladang subur bagi negara lain, tanpa pernah sempat menikmati kejayaannya sendiri. ***

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Forum Analisa dan Riset Kebijakan

Perdagangan Bebas ASEAN Jilid II

Oleh A.P. Edi Atmaja

KONFERENSI Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada 18-20 November 2012 lalu membicarakan sejumlah persoalan penting, mulai dari hak asasi manusia (HAM), tumpang-tindih kedaulatan, hingga pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam konferensi tingkat tinggi tahunan itu, Indonesia setuju untuk menandatangani kesepakatan kerjasama menuju Komunitas ASEAN 2015 dan Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (*Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*).

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 mensyaratkan pemberlakuan pasar bersama pada 2015 di antara sepuluh negara anggota ASEAN, yakni Kamboja, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Thailand, Filipina, dan Myanmar.

Sementara RCEP mencakup kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN dengan enam negara mitra dialog, meliputi Jepang, India, China, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Kerangka RCEP juga memuat pakta perdagangan bebas yang direncanakan berlaku mulai tahun 2016.

Indonesia mesti segera bersiap menuju perdagangan bebas ASEAN jilid kedua itu. Soalnya, waktu yang tersisa paling tidak tinggal tiga tahun lagi. Mampukah Indonesia bersaing dengan macan-macan Asia semacam Jepang, India, Korea Selatan, atau dengan negara ekonomi-terkuat kedua dunia seperti China?

Namun, jauh sebelum itu semestinya dipikirkan, dipertanyakan, kemudian dipastikan: bisakah Indonesia memenangi persaingan regional dengan sesama negara anggota ASEAN?

Pandai bersiasat

Selama ini, Indonesia seolah-olah memaksakan diri turut bermain dalam arena persaingan global yang tak mengenal belas kasihan. Beragam perjanjian kerjasama ekonomi ditandatangani dengan dalih memperkuat hubungan diplomatis di kawasan regional ataupun internasional.

Kenyataannya, justru negara lainlah yang memperoleh peluang untuk menanggung keuntungan sebesar-besarnya di pasar luas dengan tenaga kerja murah seperti Indonesia. Rakyat Indonesia, sebagian besarnya, hanya menjadi penonton atau konsumen yang diperas habis-habisan.

Pengalaman mengadopsi pakta perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) mengajarkan kepada kita untuk meninjau ulang persiapan yang selama ini telah kita lakukan. Kurangnya sosialisasi dan persiapan kita waktu itu membuat produk China membeludak di pasaran—bahkan merajai pasar-pasar tradisional—tanpa pernah bisa ditangkis apalagi didominasi produk domestik.

Akhirnya, Indonesia memutuskan untuk menegosiasi ulang sejumlah sektor perdagangannya dengan China. China pun sempat melayangkan protes lantaran tindakan alamiah pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap produk dalam negeri dituduh China bertentangan dengan prinsip-prinsip umum perdagangan internasional.

Dalam hukum perdagangan internasional, memang dikenal prinsip-prinsip umum yang termaktub dalam Perjanjian Umum dalam Tarif dan Perdagangan Barang (*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*) dan Perjanjian Umum dalam Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services/GATS*)—keduanya merupakan kerangka hukum yang dijamin Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).

Prinsip-prinsip umum itu antara lain, *pertama*, negara importir dilarang memberi perlakuan khusus atau melakukan pembedaan terhadap produk-produk negara anggota WTO (*most-favoured nations*). *Kedua*, negara importir mesti memperlakukan produk impor sama dengan produk nasional (*national treatment*).

Ketiga, perlindungan negara terhadap produk nasionalnya adalah hanya dengan melalui tarif, selain itu dilarang (*protection through tariff*). *Keempat*, perlakuan negara terhadap mitra dagang dari negara lain haruslah bersifat timbal-balik (*reciprocity*), khususnya dalam hal tarif bea masuk barang.

Kelima, perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara Berkembang. Prinsip ini bersifat non-resiprosikal, yang untuk mendapatkannya mesti memenuhi persyaratan tertentu (*generalized system of preferences/GSP*) (Priyono, 2012: 9-22).

Indonesia mesti pandai-pandai menyiasati prinsip-prinsip umum perdagangan internasional yang sarat nuansa liberalisasi itu. Indonesia sebagai anggota WTO mesti menaati segala persetujuan yang telah dilakukan dalam saban perundingan (*round*) WTO. Tapi, di sisi lain, pemerintah mesti melindungi kepentingan nasional, membela produsen domestik, bagaimana pun caranya.

Alternatif yang menjanjikan

Dewasa ini, pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia, demikian strategis di kancah global. Resesi yang kini melanda Eropa dan Amerika membuat banyak investor melirik Asia. Buktinya, pertumbuhan ekonomi China dan Indonesia—representasi Asia—yang kian menguat tatkala negara-negara Eropa dan Amerika mengalami kelesuan.

Asia Tengah dan Timur Tengah belum stabil secara politik, sehingga amat riskan bagi investor untuk menanam modal di sana. Asia Timur pun masih terjerat sengketa kedaulatan. Gara-gara sengketa wilayah dengan China, misalnya, pertumbuhan ekonomi Jepang merosot drastis. Keberadaan perusahaan Jepang terancam oleh sentimen nasionalisme China.

Amat beralasan bila sejumlah media melaporkan dugaan perebutan pengaruh antara China dan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kedua negara adidaya itu melihat Asia Tenggara sebagai alternatif yang menjanjikan, baik secara ekonomi maupun politik.

Dalam optik yang semacam itulah seyogianya penandatanganan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan RCEP dilihat. Ia tak lebih dari agenda global untuk memanfaatkan Asia Tenggara, pun Indonesia, semaksimal mungkin. Hal itu bisa jadi peluang, tapi juga dapat merugikan pasar dalam negeri jika tak dilakukan persiapan dan perencanaan.

Tanpa strategi yang matang dan komitmen untuk melindungi produsen domestik, Indonesia hanya akan tinggal menjadi ladang subur bagi negara lain, tanpa pernah sanggup memakmurkan rakyatnya sendiri. [25112012, 22.58]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian *Analisa* pada 28 Desember 2012.